

NORMA SOSIAL DAN KETERTIBAN DI PESANTREN: PENDEKATAN DURKHEIM TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Salasiah¹, Masdar Hilmy², Desi Erawati³

pasca2410310009@iain-palangkaraya.ac.id¹, masdarhilmy@gmail.com²,

desi.erawati@iain-palangkaraya.ac.id³

UIN Palangkaraya

Abstrak

Pembahasan di bawah ini adalah tentang membentuk nilai norma dan ketertiban sosial dalam Pesantren. Dalam perkembangan Era Society 5.0 Pondok pesantren yang nota bene sebagai lembaga pendidikan Islam harus berbenah baik dari segi pembelajaran, fasilitas, sumber daya manusia, maupun aturan-aturan atau *nidzomiul ma'had* yg diterapkan. Pesantren menerapkan pendekatan pendidikan yang berbasis agama Islam, di mana ajaran agama menjadi landasan utama dalam membentuk nilai dan norma yang diterapkan di pesantren ini. Para santri diajarkan untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, seperti menjaga akhlak yang baik, menghormati sesama, berbuat kebajikan, dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Kajian ini bertujuan mengungkap perspektif dan konstruksi pandangan sosiologi pendidikan Durkheim dan relevansinya dalam fenomena sosial pendidikan saat ini. Dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi literatur, maka disimpulkan bahwa dimensi teori sosial Durkheim, dengan paradigma fakta sosialnya tampak pada elemen pembentuk kohesi sosial atau solidaritas sosial. Durkheim telah memberikan kontribusi terhadap konstruksi sistem pendidikan dengan pendekatan sosiologi yang berbasis pendekatan struktural fungsional dan teori fakta sosial, solidaritas sosial, serta moral. **Kata Kunci:** Norma, Ketertiban Sosial, dan Durkheim.

Abstract

*The discussion below is about forming values, norms and social order in Islamic Boarding Schools. In the development of the Society 5.0 Era, Islamic boarding schools, which are Islamic educational institutions, must improve in terms of learning, facilities, human resources, and the rules or *nidzomiul ma'had* that are applied. Islamic boarding schools apply an Islamic-based educational approach, where religious teachings are the main foundation in forming the values and norms applied in this Islamic boarding school. Students are taught to live according to religious teachings, such as maintaining good morals, respecting others, doing good, and avoiding actions that are prohibited by religion. This study aims to reveal the perspective and construction of Durkheim's sociological views of education and their relevance in the current social phenomenon of education. With a descriptive analysis approach through literature studies, it is concluded that the dimensions of Durkheim's social theory, with his social fact paradigm, are seen in the elements that form social cohesion or social solidarity. Durkheim has contributed to the construction of an education system with a sociological approach based on a structural functional approach and the theory of social facts, social solidarity, and morals.*

Keywords: Norms, Social Order, and Durkheim.

PENDAHULUAN

Tempat pendidikan berbasis agama islam menjadi salah satu pilihan bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak bagi putra dan putrinya, tempat tersebut dapat disebut dengan pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki tiap-tiap asrama didalamnya. Setiap pondok pesantren memiliki peraturan tersendiri yang wajib dipatuhi oleh santri. Setiap asrama mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh pimpinan pondok pesantren, akan tetapi setiap asrama juga berhak untuk menambah peraturan sesuai dengan kebijakan tiap-tiap pengasuh asrama.

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keislaman dan keagamaan, yang dipimpin langsung oleh seorang kiai, yang sekaligus sebagai pendiri dan pemilik pondok pesantren. Kiai ini dibantu oleh beberapa guru atau ustadz dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi basic pelajaran serta menggunakan metode dan cara khas dalam pondok pesantren. Adapun pendidikan khas yang diajarkan dalam pondok pesantren itu diantaranya pendidikan agama Islam, dakwah, pengembangan hubungan kemasyarakatan dan juga pendidikan-pendidikan lain yang sejenis.

Sehingga pondok pesantren selain menjadi lembaga pendidikan keagamaan juga disebut sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Pendidikan-pendidikan tersebut terbangun melalui adanya nilai-nilai dan norma yang terdapat di pondok pesantren. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, nilai yang dikedepakan oleh pondok pesantren adalah nilai-nilai keagamaan, spiritual, dan juga nilai sosial. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, pondok pesantren dipandang sebagai tempat yang memiliki nilai baik dalam masyarakat. Nilai baik di pondok pesantren ini bertahan dikarenakan adanya norma yang dibentuk dari sebuah peraturan yang ditetapkan. Peraturan sendiri merupakan suatu acuan yang digunakan agar manusia dapat hidup tertib serta teratur. Karena jika hidup tidak ada peraturan, maka manusia akan hidup sesukanya dan tidak bisa hidup teratur dan akan sulit dikendalikan. Tentunya, peraturan yang ditetapkan di pondok pesantren ini sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan norma agama dan hal inilah yang membedakan dengan pendidikan formal pada umumnya.

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang bermartabat. Emile Durkheim mengatakan bahwa Pendidikan merupakan fakta sosial, dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karakteristik seseorang, konsep sosiologi pendidikan berawal dari kebutuhan pendidikan dalam masyarakat, ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Manusia layak untuk menjadi penghuni bumi atas nama wakil Tuhan untuk memelihara bumi karena manusia makhluk berkembang, dengan syahwatnya akan bisa mengelola alam ini.

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini, sebagian adalah berisi pelaksanaan kebiasaan-kebiasaan dan pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke hari. Di dalam kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan secara rutin itu, terdapat nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tolok ukur tentang benar tidaknya atau efektif tidaknya pelaksanaannya oleh seseorang. Norma-norma itu terhimpun menjadi aturan yang harus dipatuhi karena setiap penyimpangan atau pelanggaran akan menimbulkan keresahan, keburukan dan kehidupanpun berlangsung tidak efektif atau bahkan tidak efisien.

Dari sudut pandang lain, fungsi pendidikan pesantren dapat dikatakan sebagai alat pengendalian sosial (agent of social control) bagi masyarakat. Saat terjadi penyimpangan sosial (deviation) dalam masyarakat, khususnya penyimpangan dalam hal yang berkaitan dengan nilai-nilai islami, maka fungsi pesantren sebagai alat pengendalian sosial harus dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyimpangan sosial lebih dominan muncul di kalangan

masyarakat perkotaan. Hal ini diungkapkan oleh Emile Durkheim bahwa “Gejala deviation pada masyarakat Indonesia lebih banyak muncul dikalangan masyarakat kota besar, yang cenderung merupakan perwujudan mentalis menerabas yang ada pada hakekatnya menimbulkan sikap untuk mencapai tujuan secepatnya tanpa banyak berkorban dalam arti mengikuti langkah-langkah atau kaedah-kaedah yang telah ditentukan, Gejala seperti ini oleh Emile Durkheim dinamakan sebagai anomie” (Soekanto, 1984; 211).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai ada atau tidaknya hubungan antara norma sosial dan ketertiban terhadap peraturan di pondok pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Norma Sosial dan Ketertiban di Pesantren: Pendekatan Durkheim terhadap Lembaga Pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Durkheim

Durkheim, dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di kota Epinal Provinsi Lorraine dekat Strasbourg, daerah Timur Laut Perancis. Pada usia 21 tahun, Durkheim memasuki sekolah terkenal di Ecole Normale Superieure di Paris tahun 1879. Di Universitas tersebut dia merupakan mahasiswa yang jenius, serius, dan kritis. Di sini pulalah pemikiran Durkheim terbentuk dan dipengaruhi oleh dua orang Professor terkemuka yaitu, Fustel De Coulanges dan Emile Boutroux.

Setelah ia menamatkan pendidikan di Ecole Normale Superieure, Durkheim mengajar Filsafat di salah satu sekolah menengah atas Lycees Louis-Le-Grand di Paris pada tahun 1882-1887. Kemudian ia juga sempat ke Jerman untuk mendalami Psikologi kepada Wilhelm Wundt. Kemudian masih pada tahun 1887, ia diangkat sebagai ahli ilmu Sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Bourdeaux.

Durkheim adalah sosiolog Perancis pertama yang menempuh jenjang ilmu sosiologi paling akademis. Ia diberi posisi sebagai ilmuwan Sosial dan Pendidikan terutama dalam penelitian sosialnya. Kemudian Durkheim menetap di Jerman sampai lima belas tahun di Bordeaux, dan telah menghasilkan tiga karya besar yang diterbitkan dalam bentuk buku, tahun 1893 Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Perancis yaitu “The Division of Labour in Society” dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang Montesquieu.

Pada tahun 1902, Durkheim, diangkat sebagai professor Sosiologi dan Pendidikan di Universitas Sorbonne, Paris. Perhatian dan minat Durkheim terhadap agama yang pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, diwujudkan dalam sebuah karyanya yang berjudul “Les Formes Elementaires de Lavie Relegieuse: Le Systeme Totemique En Australie (1912)”. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Joseph Ward Swain menjadi “The Elementary of the Religious Life” (1915). Dalam buku ini mencoba menemukan elemen-elemen dasar yang membentuk semua agama. Oleh karena itu, Durkheim mengemukakan klaim utamanya tentang arti penting teori agama dan pengaruh utama klaim ini pada pemikir-pemikir lainnya secara panjang lebar yang tertuang dalam karya besar tersebut.

Menurut Durkheim, secara khusus ilmu sosial dapat diterapkan pada masalah penetapan kembali tatanan sosial diambang pergolakan-pergolakan revolusioner abad ke-18 dan efek-efek industrialisasi yang merugikan masyarakat. Durkheim berharap untuk memperlihatkan bagaimana sebuah konsensus sosial baru dapat menciptakan kembali nilai-nilai komunitas dan tatanan sosial, tanpa mengorbankan emansipasi manusia yang berasal dari keambrokan feodalisme.

2. Teori Durkheim

Emile Durkheim, (selanjutnya; Durkheim) saat ini diakui banyak pihak sebagai “Bapak Metodologi Sosiologi”, dan bahkan disebut sebagai salah satu penyumbang utama kemunculan sosiologi. Durkheim, bukan saja mampu “melejitkan” perkembangan sosiologi di Perancis, tetapi ia juga telah berhasil mempertegas eksistensi sosiologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri terukur, dapat diuji, dan objektif.

Menurut Durkheim, tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut sebagai “fakta-fakta sosial”, yakni sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal, tetapi mampu memengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Fakta sosial yang dimaksud di sini tidak hanya yang bersifat material, tetapi juga nonmaterial, seperti kultur, agama, atau institusi sosial.

Sebagai salah satu tokoh sosiologi, Durkheim tentu mencetuskan beberapa teori-teori sosial yang kemudian dikembangkan dan diterapkan ke dalam fenomena fenomena sosial saat ini, termasuk dalam ranah pendidikan.

Teori-Teori Sosial Durkheim

1. Teori Fakta Sosial

Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi melalui studi empiris. Dalam *The Rule of Sociological Method*, Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut sebagai fakta-fakta sosial. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan (*force*) dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu.

Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu. Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis.

Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau, setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak tergantung pada manifestasi individualnya. Durkheim berargumen bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi individu-individu, tetapi harus dipelajari sebagai realitasnya sendiri.

Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, dimana kesemuanya itu merupakan “fakta-fakta sosial” yang tidak direayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan “fakta sosial” tersebut. Individu akan menerima konsekuensi- konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

2. Teori Solidaritas Sosial

Solidaritas menjadi bagian yang penting dalam hubungan antara individu dengan masyarakat. Durkheim membedakan dua macam solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.

a. Solidaritas Mekanis

Solidaritas mekanis adalah bentuk solidaritas yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang dimiliki individu-individu yang memiliki sifat-sifat dan pola

pola normatif yang sama. Ciri dari solidaritas mekanik adalah tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar individu yang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanis, individu memiliki tingkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga setiap individu dapat mencukupi keinginannya tanpa tergantung dengan individu lain. Solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum represif (pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu). Anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain, dan karena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu. Pelanggar akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggaran terhadap sistem moral hanya pelanggaran kecil namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman yang berat.

b. Solidaritas Organik

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dan terjadi suatu pembagian kerja yang semakin kompleks, solidaritas kemudian berubah menjadi solidaritas organik. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi akibat semakin beragamnya pembagian kerja sehingga memunculkan spesialisasi pekerjaan. Masing-masing individu memiliki suatu keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu pekerjaan sehingga tanpa kehadirannya akan mengakibatkan individu lain tidak dapat mencukupi keinginannya.

Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif (ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks). Dimana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka, pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau sekmen tertentu dari masyarakat bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. Dalam hal ini, kurangnya moral kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum. Durkheim berpendapat masyarakat modern bentuk solidaritas moralnya mengalami perubahan bukannya hilang. Dalam masyarakat ini, perkembangan kemandirian yang diakibatkan oleh perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individual yang lebih mandiri, akan tetapi sekaligus menjadi semakin tergantung satu sama lain, karena masing-masing individu hanya merupakan satu bagian saja dari suatu pembagian pekerjaan sosial.

Kedua tipe masyarakat di atas terdapat perbedaan. Masyarakat yang ditandai dengan solidaritas mekanik cenderung bersatu dan lebih bersifat komunal. Sedangkan dalam masyarakat organik, masing masing melakukan kegiatan dengan pembagian kerja, sehingga berbeda tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat dengan ciri solidaritas organik cenderung lebih individual.

3. Norma Sosial dalam Konteks Pesantren

Norma berasal dari bahasa Perancis “norme” dan bahasa Latin “norma” yang berarti siku tukang kayu, aturan, dan pola. Dalam bahasa Inggris, norma disebut norm yang berarti ketertiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “norma” memiliki dua arti: pertama, aturan atau ketentuan di kelompok masyarakat yang mengikat dan digunakan sebagai pedoman dalam tingkah laku. Kedua, norma berarti aturan, ukuran atau kaidah yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai dan membandingkan sesuatu.

Norma secara umum merupakan sebuah ukuran, baik itu tepat ataupun tidak, benar ataupun salah, dan pantas ataupun tidaknya perilaku seseorang dalam kelompok masyarakat.

Sedangkan pengertian norma menurut Broom & Selznic merupakan sebuah konsep guna memberikan suatu batasan pada perilaku ideal manusia bagi anggota masyarakat untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.

Di tengah – tengah perubahan di era modern, pesantren mengajarkan nilai-nilai agama yang relevan dengan era modern melalui berbagai cara. Selain pembelajaran agama yang mencakup pemahaman tentang Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqh, pesantren juga mengadakan diskusi dan kajian tentang isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Hal ini membantu para santri untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern, seperti etika berinternet, pengelolaan lingkungan, dan toleransi antar agama. Pendekatan yang inklusif terhadap pendidikan agama dengan memasukkan diskusi dan kajian tentang isu-isu kontemporer sangat penting dalam mengaitkan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari pada era modern. Pemahaman agama yang benar tidak hanya bergantung pada memahami teks-teks suci, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks zaman sekarang. Diskusi dan kajian tentang isu-isu kontemporer membantu para santri dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ajaran agama dapat diimplementasikan dalam situasi dunia nyata. Misalnya, ketika membahas etika berinternet, para santri dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip seperti sopan santun, kehati-hatian, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dapat didasarkan pada ajaran agama. Begitu pula, pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan memberikan kesempatan bagi para santri untuk memahami pentingnya menjaga alam sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan tanggung jawab terhadap alam semesta ciptaan Allah. Selain itu, diskusi tentang toleransi antaragama dapat membantu para santri dalam memahami keragaman keyakinan dan menghormati perbedaan, yang merupakan nilai penting dalam masyarakat multikultural saat ini. Ini membentuk dasar bagi pembentukan karakter yang inklusif dan toleran. Dengan demikian, pendekatan holistik pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan isu-isu kontemporer memberikan landasan yang kokoh bagi para santri untuk tidak hanya memahami agama tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Hal ini membantu mereka menjadi individu yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga membawa dampak positif dalam masyarakat melalui pemahaman yang mendalam tentang etika, tanggung jawab sosial, dan toleransi. Selain itu untuk melibatkan para santri dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat di era modern dengan mengadakan program-program pengabdian masyarakat. Para santri diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk amal, bakti sosial, dan program-program kemanusiaan. Hal ini membantu para santri untuk mengembangkan sikap empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Pondok pesantren telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan membangun moral bangsa Indonesia. Melalui pendekatan agama, pendidikan karakter, dan pengembangan pribadi, pondok pesantren telah berhasil menjalin kontribusi yang berarti terhadap pembangunan moral dan etika dalam masyarakat Indonesia.

Pertama-tama, pondok pesantren memainkan peran penting dalam membentuk moral bangsa Indonesia melalui pendekatan agama. Sebagai pusat pembelajaran Islam, pondok pesantren menekankan pada pemahaman nilai-nilai agama, etika, dan ajaran Islam yang benar.

Santri, atau peserta didik di pondok pesantren, diajarkan tentang akhlak mulia, kesederhanaan, toleransi, dan kedisiplinan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Mereka diajarkan untuk hidup dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral, seperti jujur,

adil, dan peduli terhadap sesama. Melalui pendekatan ini, pondok pesantren membantu membangun moral yang kuat dan integritas di kalangan santri, yang selanjutnya dapat membawa pengaruh positif dalam masyarakat.

Selain itu, pondok pesantren juga berperan dalam membentuk moral bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter. Pendidikan di pondok pesantren tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kepribadian yang baik. Santri diajarkan untuk menghargai nilai-nilai kebaikan, seperti kerja keras, tanggung jawab, keteladanan, dan kejujuran. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar mandiri, mengambil inisiatif, dan memimpin dengan bijaksana. Pendidikan karakter ini membantu membentuk individu yang bertanggung jawab, memiliki kepekaan sosial, dan memiliki moralitas yang baik.

Pondok pesantren juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun moral bangsa Indonesia melalui pengembangan pribadi. Santri diajarkan untuk mengembangkan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial mereka. Mereka dilibatkan dalam kegiatan yang memperkuat kepribadian mereka, seperti pengembangan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pemberdayaan diri. Melalui lingkungan yang mendukung dan bimbingan para kyai (pendidik agama), santri didorong untuk menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

4. Hubungan antara Norma dan Ketertiban Sosial di Pesantren

Norma merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial baik yang bersifat mekanik maupun organik (Durkheim) atau tradisional maupun rasional (Weber). Dalam perspektif sosiologi, norma (Rose, et al., 1982:59) adalah 'rules' yang diharapkan diikuti oleh masyarakat. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang. Norma, biasanya diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar.

Norma-norma di pesantren adalah kunci utama dalam menjaga ketertiban sosial. Norma ini, yang meliputi aturan-aturan perilaku, etika, dan nilai-nilai, membentuk fondasi kehidupan bersama di lingkungan pesantren dan membantu meminimalisir konflik serta menciptakan suasana yang harmonis.

Ketertiban sosial di pesantren sangat penting karena menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan tumbuh. Hal ini dilakukan melalui aturan-aturan yang mengatur perilaku santri, seperti tata tertib, sanksi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pesantren juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam.

5. Dampak Ketidakpatuhan terhadap Norma

Seorang santri dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Setiap santri dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di pondok pesantren, ketertiban dirasa sangat penting bagi santri pondok pesantren, maka pihak sekolah pertama kali perlu menertibkan santri yang memang sering melanggar peraturan dan tata tertib sekolah yang sudah menjadi kewajiban santri untuk dipatuhi dan di ikuti.

Menurut Kartono, Zhang dan Arvery yang dikutip oleh Wahyu Widiatoro dan Romadhon Perilaku melanggar peraturan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok . Perilaku melanggar peraturan dapat berarti positif atau negatif. Dalam arti positif, pelanggaran peraturan berarti individu berusaha menemukan hal-hal baru demi mendapatkan kreatifitas dan inovasi, (Widiatoro & Romadhon, 2015). Dalam arti negatif, pelanggaran peraturan dikalangan remaja berarti perilaku anti sosial atau tidak patuh (anticonfrimity) pada peraturan. Pelanggaran negatif itu biasanya berkisar pada hal-hal yang berbahaya seperti merokok,

berhubungan seks di luar ikatan perkawinan atau pacaran, minum-minuman keras, vandalisme, dan sebagainya.

Penanganan santri bermasalah di Pondok Pesantren cukup beragam tergantung dari jenis pelanggarannya. Sebelum santri bermasalah ditangani oleh pihak berwajib terlebih dahulu diselidiki kebenaran pelanggarannya, apakah benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak, sehingga dalam memberikan sanksi sesuai dengan kadar pelanggarannya.

Pemberian sanksi pada santri bermasalah tersebut diawali dengan proses yang sangat panjang, mulai dari penyidikan dan penyeledikan, hingga proses konfirmasi pada saksi-saksi yang mengetahui kejadian terhadap pelanggaran tersebut. Mekanisme ini cukup baik sebelum memberikan sanksi pada santri. Ini dilakukan agar tidak ada kesewenangan dari pihak Kamtibmas dalam memberikan sanksi pada santri. Sedangkan macam-macam sanksi yang akan dijatuhkan pada santri bermasalah beragam sesuai dengan kategori pelanggarannya, seperti sanksi ringan, sedang dan berat. Adapun kategori sanksi ringan seperti membaca surat-surat pendek, menghafalkan surat-surat yaitu sanksi ringannya. Sanksi sedangnya ya mungkin ada kegiatan fisik, misalnya; bersih-bersih, bisa saja digundul, sanksinya bisa menggantikan barang apabila pelanggaran pencurian, ada berdiri sambil membaca dan menghafalkan sesuatu yang manfaat untuk anaknya sambil berdiri di depan teman santri yang lainnya di depan wilayah.

Dasar pemberian sanksi pada santri bermasalah di Pondok Pesantren adalah Tata Tertib Pondok Pesantren. Tata tertib yang dikeluarkan pesantren ini menjadi acuan utama dalam memberikan sanksi pada santri. Karena di dalamnya diatur juga kriteria-kriteria pelanggaran yang bisa mendapatkan sanksi, apakah kategori berat, ringan atau sedang. Sehingga melalui peraturan ini, pihak pesantren sudah jelas acuannya dan tidak ada ruang untuk melakukan penanganan secara sepihak.

Petter L. Berger (dalam Narwoko dan Suyanto, 2007, hlm.132) menyatakan bahwa, 'Berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang'. Berdasarkan pernyataan tersebut, pesantren melakukan berbagai upaya untuk mengatasi santri yang menyimpang agar kembali berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di pesantren. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan kepada upaya yang bersifat represif. Narwoko dan Suyanto (2004, hlm. 134) menyatakan bahwa, "Kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat represif".

Relevansi Teori Durkheim dalam Konteks Pesantren

Menurut Durkheim, pendidikan bukan hanya tentang penyampaian pengetahuan akademis semata. Lebih dari itu, pendidikan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi kohesi sosial. Ia memandang moralitas sebagai fondasi penting dalam memastikan stabilitas dan kesinambungan masyarakat.

Pendidikan moral dalam pandangan Durkheim merupakan sarana untuk mengajarkan pentingnya kewajiban, tanggung jawab, dan rasa solidaritas dalam hubungan sosial. Dia meyakini bahwa pendidikan moral akan membantu dalam membentuk individu yang lebih sadar akan peran dan kontribusinya dalam masyarakat.

Durkheim melihat bahwa pendidikan moral memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk berinteraksi secara positif dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dengan memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai moral yang bersifat kolektif, individu dapat lebih baik memahami peran mereka dalam memelihara keseimbangan dan stabilitas sosial.

Konsep pendidikan moral menurut Durkheim tetap relevan dan mampu menjadi panduan bagi pendidikan moral anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan moral anak di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kerusakan moral, globalisasi, pluralisme, dan radikalisme.

Penerapan teori pendidikan moral Durkheim di sekolah-sekolah di Indonesia termasuk di dalamnya pesantren, dapat terwujud melalui kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama dan moral, kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan kerjasama, kebersamaan, dan kreativitas, metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan kritis, serta berbagai kegiatan seperti diskusi, debat, simulasi isu-isu sosial, kunjungan lapangan, program pertukaran pelajar, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pendidikan moral yang holistik bagi anak-anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Pesantren menerapkan pendekatan pendidikan yang berbasis agama Islam, di mana ajaran agama menjadi landasan utama dalam membentuk nilai dan norma yang diterapkan di pesantren ini. Para santri diajarkan untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, seperti menjaga akhlak yang baik, menghormati sesama, berbuat kebajikan, dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai agama yang relevan dengan zaman modern melalui berbagai cara, serta memperkuat pendidikan agama dan Islam secara intensif, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam setiap aspek kehidupan pesantren. Pesantren juga memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Aturan dan tata tertib pesantren yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama membantu menciptakan lingkungan yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan nilai dan norma antara Pesantren dan masyarakat umum terletak pada sumber dan dasar yang menjadi pijakan aturan dan tata tertib di kedua lingkungan tersebut. Pesantren mengacu pada ajaran agama Islam sebagai landasan utama dalam menegakkan nilai dan norma yang berlaku di dalamnya. Meskipun ada perbedaan ini, penting untuk dicatat bahwa nilai dan norma di pesantren tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Selain itu, Durkheim telah memberikan kontribusi besar dalam mengkonstruksi metode berpikir sosiologis berdasarkan pemikiran-pemikiran filosofis menjadi ilmu pengetahuan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang dapat diobservasi. Durkheim merekomendasikan studi sosial, termasuk studi tentang pendidikan dilakukan menurut standar-standar empirik, dengan fakta sosial sebagai fokus perhatian utama. Durkheim, telah memberikan kontribusi terhadap konstruksi sistem pendidikan dengan pendekatan sosiologi yang berbasis pendekatan struktural fungsional dan teori fakta sosial, solidaritas sosial, serta moral. Durkheim menekankan bangunan pendidikan yang berbasis penguatan nilai-nilai kesadaran kolektif, plus pemberian pengetahuan dan skill peserta didik dalam rangka untuk survive dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Matulesy, Pratitis, "Kepatuhan terhadap Peraturan di Pondok Pesantren: Bagaimana Peranan Kontrol Diri". *INNER: Journal of Psychological Research* Vol. 4 No. 1, 2024
- Rahma, "Manajemen Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo". Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2018
- Saputri, Afida, "Peran Agama dalam Membentuk Nilai dan Norma Pesantren Darul Muttaqien". *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Vol. 2 No. 2, 2024
- Ruman, "Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis", *Jurnal Hukum Prioris* Vo. 2 No. 2, 2009
- Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan", *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 1 No. 2
- Bilal, dkk, "Peranan Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pengendalian Sosial Masyarakat Kota Metro", *Jurnal of Social Science Educatiaon* Vol. 1 No. 1, 2020

Mushafi, Hidayatullah, Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman", *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol.08 No.02, Agustus 2021

Hoerunnisa, Wilodati, Kosasih, "Strategi Pihak Pesantren Dalam Mengatasi Santri Yang Melakukan Perilaku Menyimpang", *Sosietas*, Vol. 7, No. 1, 2017

Lailia, Lutfi, "Sikap Santri terhadap Nilai dan Norma di Pondok Pesantren Al-Amien Rejomulyo Kota Kediri". *Etheses IAIN Kediri*, 2023

Surip, "Manajemen Entitas untuk Perkembangan Pondok Pesantren di Era Society". *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, Vol. 4. No. 1, Januari 2023

Virgianti, "Pendidikan Moral Perspektif Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan di Indonesia", *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.2, No.4 Desember 2023

<https://www.kompasiana.com/ainun13134/648895434addee1bc95c27d2/peran-pondok-pesantren-dalam-membangun-moral-bangsa-indonesia>